

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

UU No. 3. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pemerintah Republik Indonesia.*

UUD. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 105 § (1945).

BUKU

Drs. P.A.F. Lamintang. S.H. (1989). *DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN-KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN*. Penerbit SINAR BARU Bandung.

Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana : Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.

Hardjasoemantri, K. (2012). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Husin, T. (2023). *Alat Bukti Dan Barang Bukti dalam KUHAP*.

KUHP. (1981). *Kitab Hukum Acara Pidana - Buku Kesatu: Aturan Umum*, 5(1), 1–133. Mezak, M. H. (2006). *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. *Law Review*, 5(3), 85–97.

Salim, H. (2018). *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara (Tarmizi, Ed.)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Silalahi, D. (2015). *Hukum Lingkungan : Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Keni Media.

JURNAL

Carin, A. A., Sund, R. B., & Lahkar, B. K. (2018). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Dalam Menilai Keterangan Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Penambangan Illegal (Studi Kasus*

- Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 447/Pid.Sus/2018/PN Clp). *Journal of Controlled Release*, 11(2), 430–439.
- Ghoyasi, A. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Regulasi Terhadap Keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).*
- Illuzy, A. (2015). Analisis Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral Ditinjau dari Aspek Sosiologis, Yuridis, Filosofis.
- Mohanty. (2016). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa, *15*(1), 165–175.
- Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(1), 407.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sanawiah, I. (2022). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 N.*
- Sri, I. N., Rusnama, A., Ayu, I., Widiati, P., & Sugiarta, I. N. (2019). Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid. Sus/2017/PN Gin). *Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120 / Pid . Sus / 2017 / PN Gin)*, 1(4), 384–389.
- Sucantra, I. M. B., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba). *Analogi Hukum*, 1(3), 366–371.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.

<https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>

Ubwarin, E., Leasa, E. Z., & Soplantina, V. D. (2020). Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar. *Bacarita Law Journal*, 1(1), 38–53. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2790>

Whitney, G. G., Foster, D. R., Bozkurt, Y., & Ebru, A. (2008). *Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan Di Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Oleh Hakim*. Central-South University of Technology, China.

SUMBER LAIN

Wahyudi, E. (2022). 8 Negara Penghasil Timah Terbesar di Dunia, Indonesia Peringkat Kedua.

Voa. (2018). Eksploitasi Batu Bara Rusak Kalimantan.
<https://www.voaindonesia.com/a/eksploitasi-batu-bara-rusak-kalimantan/1803156.html>.